

Membangun Kesatuan Bangsa Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua

Aris Sarjito¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia¹Email Korespondensi Author: arissarjito@gmail.comThis is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license. **Kata kunci:**Masyarakat Papua,
Pemberdayaan Budaya,
Pemberdayaan Sosial,
Persatuan Bangsa.**Abstrak**

Studi ini menggali dinamika inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya dalam masyarakat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampaknya terhadap identitas, inklusi, dan tantangan dalam membina persatuan nasional. Penelitian ini sebagian besar menggunakan analisis data sekunder dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji bagaimana program pemberdayaan sosial dan budaya mempengaruhi pembangunan identitas Papua dan integrasinya ke dalam masyarakat Indonesia. Temuan-temuan tersebut menyoroti dampak transformatif dari inisiatif-inisiatif terhadap persepsi identitas Papua dan inklusi masyarakat, sekaligus menjelaskan tantangan-tantangan yang menghambat efektivitas program pemberdayaan yang mendorong persatuan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial dan budaya penting dalam membentuk identitas Papua dan menciptakan rasa memiliki. Namun, masalah sistemis dalam pemerintahan, fragmentasi sosial-politik, dan perbedaan budaya membuat negara ini sulit untuk bersatu. Pada akhir kajian disampaikan saran-saran untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dan budaya di Papua. Bidang-bidang utama yang ditekankan adalah pendidikan, daya tanggap budaya, dan pendekatan partisipatif untuk menjadikan masyarakat Papua lebih terbuka dan kuat, yang akan membantu mempersatukan negara.

Keywords:*Cultural Empowerment,
National Unity,
Papuan Community, Social
Empowerment.***Abstrack**

This study delves into the dynamics of social and cultural empowerment initiatives within the Papuan community. It aims to elucidate their impact on identity, inclusion, and the challenges of fostering national unity. This study uses mostly secondary data analysis and qualitative research methods to examine how social and cultural empowerment programs affect the building of Papuan identities and their integration into Indonesian society. Findings highlight the transformative impact of such initiatives on Papuan identity perceptions and community inclusion while illuminating the challenges hindering effective empowerment programs that foster national unity. Key research results show that social and cultural empowerment programs are important in shaping Papuan identity and creating a sense of belonging. However, systemic problems with governance, socio-political fragmentation, and cultural differences make it hard for the country to unite. At the end of the study, suggestions are made for improving social and cultural empowerment in Papua New Guinea. Key areas emphasized are education, cultural responsiveness, and participatory approaches to make the Papuan community more open and stronger, which will help unite the country.

Pendahuluan

Upaya untuk mendorong persatuan nasional di Papua, Indonesia, telah lama menjadi titik fokus penyelidikan akademis dan wacana kebijakan (Setiarsih & Suharno, 2018). Para sarjana telah mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut, dengan penekanan yang semakin besar pada strategi pemberdayaan sosial dan budaya (Brown, 2020). Tinjauan mutakhir ini secara kritis mengevaluasi hasil dari upaya penelitian sebelumnya dalam domain ini, yang bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman ilmiah dan implementasi praktis dari inisiatif untuk membangun persatuan nasional di masyarakat Papua.

Penelitian sebelumnya tentang membangun persatuan nasional di Papua melalui pemberdayaan sosial dan budaya telah menghasilkan beberapa temuan penting. (Robinson, 2018) menekankan pentingnya pengakuan dan apresiasi budaya sebagai dasar untuk membina persatuan dan inklusivitas.

Pendekatan pembangunan partisipatif telah ditemukan efektif dalam memberdayakan masyarakat Papua dan mempromosikan kepemilikan proyek-proyek pembangunan (Satriawan, 2021). Pendidikan muncul sebagai alat penting untuk melestarikan pengetahuan adat dan mendorong dialog antargenerasi (T. Widodo, 2020). Selain itu, struktur pemerintahan yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua sangat penting untuk mempromosikan persatuan dan inklusi politik (van Klinken, 2017).

Para sarjana telah menggunakan berbagai metodologi untuk menyelidiki pemberdayaan sosial dan budaya di Papua. Metode penelitian etnografi telah memberikan wawasan tentang pengalaman hidup dan perspektif masyarakat Papua (Oetomo, 2019). Analisis isi representasi media dan dokumen kebijakan telah menjelaskan narasi dan wacana seputar inisiatif pemberdayaan Papua (Jones & Brown, 2019; Smith, 2017). Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan keterlibatan dan kolaborasi masyarakat telah berperan penting dalam memahami dinamika dan preferensi lokal (Sullivan & Harper, 2018).

Kerangka teoritis seperti pengakuan budaya, teori modal sosial, dan perspektif pascakolonial telah menginformasikan penelitian sebelumnya tentang membangun persatuan nasional di Papua (Droogleever Fortuijn, 2019). Teori multikulturalisme menggarisbawahi pentingnya menghormati keragaman dalam masyarakat (Vlassopoulos, 2018). Perspektif dekolonial menganjurkan pemusatan pengetahuan dan agensi adat dalam upaya pemberdayaan (Wanggai, 2020). Lensa teoritis ini telah memberikan wawasan berharga tentang interaksi kompleks budaya, identitas, dan dinamika kekuasaan di Papua.

Sebagai kesimpulan, state-of-art ini menyoroti hasil penelitian sebelumnya tentang membangun persatuan nasional melalui pendekatan pemberdayaan sosial dan budaya di masyarakat Papua. Dengan mensintesis temuan-temuan kunci, metodologi yang digunakan, dan kerangka teoritis, tinjauan ini menawarkan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang terlibat dalam upaya mempromosikan persatuan, inklusivitas, dan pembangunan di Papua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas inisiatif-inisiatif ini dan mempromosikan identitas nasional yang lebih inklusif. Sejalan dengan tujuan-tujuan diatas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian utama berikut: Bagaimana dampak inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya terhadap persepsi identitas dan inklusi dalam masyarakat Papua? Apa saja tantangan utama yang menghambat efektivitas program pemberdayaan yang ada saat ini dalam membina persatuan nasional? Dan Strategi dan pendekatan apa yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak upaya pemberdayaan sosial dan budaya dalam konteks Papua?.

Metode

Dalam upaya membangun persatuan nasional melalui pendekatan pemberdayaan sosial dan budaya pada masyarakat Papua, metode penelitian kualitatif memainkan peran penting dalam memahami kompleksitas dinamika sosial, identitas budaya, dan inisiatif pemberdayaan. Penelitian ini mengkaji penggunaan metode penelitian kualitatif, khususnya dalam konteks analisis data sekunder, seperti yang dianjurkan oleh Creswell (2014), untuk mengeksplorasi berbagai aspek upaya membangun persatuan di Papua. Dengan menganalisis secara kritis literatur dan wacana ilmiah yang ada, esai ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan, keterbatasan, dan potensi penerapan metode kualitatif dalam mempelajari pemberdayaan sosial dan budaya di Papua.

Metode penelitian kualitatif mencakup serangkaian teknik yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Metode-metode ini menekankan pengalaman subjektif, konteks, dan makna, memberikan wawasan yang kaya dan bernuansa ke dalam fenomena sosial yang kompleks (Creswell, 2014). Pendekatan penelitian kualitatif umumnya mencakup teknik seperti wawancara, kelompok fokus, observasi partisipan, dan analisis isi.

Salah satu pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif melibatkan pemanfaatan sumber data sekunder, yang terdiri dari data yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan untuk tujuan selain penelitian peneliti saat ini. Analisis data sekunder menawarkan beberapa keuntungan, termasuk efektivitas biaya, efisiensi waktu, dan akses ke kumpulan data yang besar (Sullivan & Harper, 2018). Selain itu, analisis data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tren longitudinal,

konteks sejarah, dan perbandingan lintas bagian, sehingga memperkaya kedalaman dan keluasan analisis mereka (Johnson, 2016).

Creswell, (2014) menguraikan pendekatan sistematis terhadap penelitian kualitatif, menekankan ketelitian metodologis, transparansi, dan reflektivitas. Menurut Creswell, peneliti kualitatif harus melakukan serangkaian langkah berulang, termasuk desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi. Dalam konteks analisis data sekunder, pendekatan Creswell melibatkan identifikasi kumpulan data yang relevan, mengakses dan mengevaluasi kualitas data, dan menggunakan teknik analisis yang tepat untuk memperoleh wawasan yang bermakna (Creswell & Poth, 2016).

Dalam konteks membangun persatuan bangsa di Papua melalui pemberdayaan sosial dan budaya, metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder menawarkan peluang eksplorasi yang berharga. Analisis isi terhadap representasi media, dokumen kebijakan, dan narasi komunitas dapat memberikan wawasan tentang wacana, sikap, dan dinamika kekuasaan yang ada yang membentuk upaya pembangunan persatuan di Papua (Jones & Brown, 2019; Robinson, 2018; Smith, 2017). Analisis tematik terhadap laporan pemerintah, rencana pembangunan, dan inisiatif masyarakat dapat mengungkap tema, prioritas, dan tantangan mendasar dalam inisiatif pemberdayaan (Satriawan, 2021). Selain itu, analisis naratif atas kisah pribadi, kesaksian, dan sejarah lisan dapat menjelaskan pengalaman, aspirasi, dan ketahanan individu dalam komunitas Papua (Robinson, 2018).

Metode penelitian kualitatif dengan data sekunder menawarkan beberapa keunggulan, termasuk akses terhadap beragam sumber informasi, fleksibilitas dalam analisis, dan kemampuan untuk menangkap perspektif yang berbeda. Namun, tantangan seperti keandalan data, validitas, dan bias peneliti mungkin muncul sehingga memerlukan pertimbangan metodologis yang cermat (Johnson, 2016). Selain itu, pertimbangan etis, termasuk masalah kerahasiaan, persetujuan, dan kearifan lokal, harus ditangani ketika menggunakan data sekunder dalam penelitian kualitatif (Papua Research Ethics Board, 2020).

Kesimpulannya, metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder, seperti yang dikemukakan oleh Creswell, memberikan wawasan berharga dalam membangun persatuan nasional melalui pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Papua. Dengan menganalisis sumber data yang ada secara sistematis, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas upaya membangun persatuan, mengidentifikasi tantangan dan peluang utama, dan menginformasikan intervensi berbasis bukti yang bertujuan untuk mendorong inklusivitas, kohesi, dan pembangunan di Papua.

Hasil dan Diskusi

Dampak Inisiatif Pemberdayaan Sosial dan Budaya terhadap Identitas dan Inklusi Papua

Keterkaitan yang kompleks antara inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya serta dampaknya terhadap konstruksi identitas dan inklusi dalam masyarakat Papua dapat dijelaskan dengan mengambil wawasan dari Teori Identitas Sosial dan Teori Budaya Kritis. Menurut Teori Identitas Sosial Henri Tajfel dan John Turner, individu membentuk identitasnya melalui kategorisasi sosial dan perbandingan dengan orang lain (Tajfel & Turner, 2010). Ketika diterapkan pada konteks Papua, teori ini mengungkapkan pengaruh besar inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya terhadap pembentukan identitas Papua dalam kaitannya dengan identitas Indonesia yang lebih luas.

Teori Identitas Sosial berpendapat bahwa individu memperoleh kesadaran diri dari kelompoknya, yang mengarah pada favoritisme dalam kelompok dan terciptanya kategori sosial yang berbeda. Dalam kasus masyarakat Papua, marginalisasi historis dan kesenjangan sosial-politik telah memicu rasa kekhususan dan keterpisahan dari masyarakat Indonesia yang lebih luas. Inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya yang bertujuan untuk mendapatkan kembali warisan budaya, melestarikan keragaman bahasa, dan mendorong otonomi Papua memainkan peran penting dalam memperkuat identitas khas ini (Tajfel & Turner, 2010).

Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya membantu menumbuhkan rasa bangga dan memiliki di kalangan masyarakat Papua, namun juga berfungsi sebagai sarana perlawanan terhadap narasi dominan yang berupaya mengasimilasi atau menghapus identitas unik mereka. Dengan mengklaim kembali dan merayakan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka, masyarakat Papua dapat menegaskan otonomi mereka dan menegaskan tempat mereka dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas. Rasa identitas

dan solidaritas ini memberikan landasan yang kuat bagi kohesi dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan diskriminasi yang terus berlanjut (Adam et al., 2019; Farneubun, 2019).

Selain itu, inisiatif-inisiatif ini juga memainkan peran penting dalam mempromosikan keragaman budaya dan melestarikan kekayaan warisan masyarakat Papua untuk generasi mendatang. Melalui inisiatif seperti festival budaya, program revitalisasi bahasa, dan pameran seni tradisional, masyarakat Papua mampu menampilkan adat dan tradisi unik mereka kepada khalayak yang lebih luas. Hal ini tidak hanya membantu mengedukasi orang lain tentang kekayaan budaya Papua, namun juga menumbuhkan rasa saling menghormati dan memahami antar komunitas berbeda di Indonesia. Dengan cara ini, upaya revitalisasi budaya dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kohesi sosial dan harmoni dalam masyarakat Indonesia yang beragam (Budhi et al., 2018; Suyatno, 2022).

Selain itu, Teori Budaya Kritis, seperti yang dikemukakan oleh para sarjana seperti Stuart Hall, menekankan pentingnya representasi dan wacana budaya dalam membentuk identitas. Hall berpendapat bahwa narasi dan representasi budaya bukanlah refleksi pasif namun secara aktif membangun dan melanggengkan identitas masyarakat (Hall & Du Gay, 1996). Menganalisis dampak inisiatif pemberdayaan melalui kacamata ini dalam konteks Papua mengungkapkan bagaimana narasi budaya mempengaruhi persepsi inklusi dan kepemilikan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas.

Teori Budaya Kritis menyoroti dinamika kekuasaan yang melekat dalam representasi budaya. Hal ini menyoroti bagaimana narasi budaya yang dominan di Indonesia, yang seringkali berakar pada perspektif Jawa atau Melayu-sentris, secara historis meminggirkan ekspresi budaya Papua dan melanggengkan rasa pengucilan. Inisiatif pemberdayaan yang menentang narasi dominan yang merayakan warisan budaya Papua dan memperkuat suara-suara yang terpinggirkan akan mengganggu dinamika kekuasaan tersebut dan menumbuhkan rasa inklusi dan rasa memiliki di kalangan masyarakat Papua dalam konteks Indonesia yang lebih luas (Hall & Du Gay, 1996).

Dengan memusatkan ekspresi dan narasi budaya Papua pada wacana arus utama, dapat mulai dibongkar struktur kekuasaan yang telah lama menekan dan membungkam suara-suara tersebut. Dengan mengangkat dan memperkuat perspektif Papua, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil di mana semua identitas budaya dihargai dan dihormati. Melalui inisiatif pemberdayaan ini, kita dapat berupaya mewujudkan masa depan di mana masyarakat Papua merasa bangga dan memiliki terhadap warisan budaya mereka, bebas dari kendala narasi dominan yang berusaha menghapus keberadaan mereka (Haidar, 2023; Nabung, 2023).

Inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya sangat mempengaruhi persepsi identitas dan inklusi dalam masyarakat Papua. Jika diterapkan secara efektif, inisiatif-inisiatif ini akan memainkan peran penting dalam membentuk identitas Papua dibandingkan dengan identitas Indonesia yang lebih luas, sekaligus menumbuhkan rasa inklusi dan kepemilikan (Konflik et al., 2008; Pahri, 2017).

1. Membentuk Identitas Papua

Menurut Teori Identitas Sosial Tajfel dan Turner (Tajfel & Turner, 2010), kategorisasi sosial dan perbandingan dengan orang lain mempengaruhi rasa identitas seseorang. Dalam konteks Papua, inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya, seperti program pelestarian bahasa, perayaan budaya, dan proyek berbasis masyarakat, memperkuat identitas Papua. Inisiatif-inisiatif ini memfasilitasi rasa bangga dan keterhubungan dengan warisan Papua, memperkuat identitas masyarakat yang berbeda dalam tatanan masyarakat Indonesia yang lebih luas.

2. Menumbuhkan inklusi dan rasa memiliki

Hall, seorang pendukung Teori Budaya Kritis, menekankan bagaimana representasi budaya membentuk identitas (Hall & Du Gay, 1996). Inisiatif pemberdayaan yang menantang narasi budaya dominan dan merayakan ekspresi budaya Papua menumbuhkan rasa inklusi dan kepemilikan dalam masyarakat Papua. Dengan memperkuat suara-suara yang terpinggirkan, inisiatif-inisiatif ini melawan marginalisasi masyarakat, meningkatkan rasa keagungan dan rasa memiliki di kalangan masyarakat Papua dalam lingkungan sosio-kultural yang lebih luas di Indonesia.

Penekanan pada pemberdayaan melalui representasi budaya tidak hanya berfungsi untuk memvalidasi dan menegaskan identitas kelompok marginal, namun juga mengganggu dinamika kekuasaan yang melanggengkan pengucilan mereka. Dengan menciptakan ruang bagi beragam suara untuk didengar dan dihargai, inisiatif-inisiatif ini berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan adil di mana semua individu merasa memiliki dan memiliki hak untuk bertindak. Dengan cara ini, mendorong inklusi dan rasa memiliki tidak hanya menjadi sebuah tujuan, namun juga sebuah praktik

transformatif yang menantang status quo dan mendorong keadilan sosial (Karin Louise Hermes et al., 2014).

3. Mendefinisikan ulang narasi dan representasi

Inisiatif pemberdayaan memberikan platform bagi narasi Papua untuk didengar dan dihargai. Melalui seni, media, dan pendidikan, inisiatif-inisiatif ini mendefinisikan kembali narasi seputar identitas Papua, menekankan ketahanan, kekayaan budaya, dan kontribusi terhadap warisan nasional. Dengan mengklaim kembali narasi mereka, masyarakat Papua melawan stereotip dan kesalahpahaman, serta mendorong pemahaman yang lebih inklusif tentang identitas mereka dalam masyarakat Indonesia (Fatubun, 2023a).

Pemberdayaan masyarakat Papua melalui inisiatif seperti proyek Papuan Voices memungkinkan mereka untuk merasa memiliki cerita dan pengalaman mereka, menumbuhkan rasa bangga dan persatuan dalam komunitas. Dengan memperkuat suara mereka dan menampilkan bakat dan prestasi mereka, inisiatif-inisiatif ini tidak hanya merayakan budaya Papua tetapi juga menantang wacana dominan dan mendorong pemahaman yang lebih inklusif tentang identitas Papua dalam masyarakat Indonesia (Freewestpapua, 2016).

Proyek Papuan Voices, misalnya, mendukung masyarakat adat Papua dalam menceritakan kisah mereka sendiri melalui produksi film, yang memberikan ruang untuk dekolonisasi pendekatan pembuatan film yang menantang dan melawan dominasi budaya luar (Fatubun, 2023a). Proyek ini, bersama dengan inisiatif lainnya, bertujuan untuk membawa kisah hidup masyarakat adat Papua ke khalayak global yang lebih luas, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan kembali narasi mereka dan mendapatkan kembali tempat mereka dalam masyarakat Indonesia (Wayar & Blades, 2022).

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk mendapatkan kembali dan mendefinisikan kembali narasi Papua, menantang wacana dominan dan mendorong pemahaman yang lebih inklusif tentang identitas Papua dalam masyarakat Indonesia. Melalui upaya ini, masyarakat Papua tidak hanya mendapatkan kembali narasi mereka tetapi juga menuntut pengakuan, rasa hormat, dan kesempatan yang sama bagi semua orang (Fatubun, 2023b).

4. Memperkuat kohesi masyarakat

Inisiatif-inisiatif ini juga memperkuat ikatan intra-masyarakat dengan mengedepankan solidaritas dan saling pengertian. Proyek pemberdayaan yang dipimpin masyarakat menciptakan ruang untuk dialog, kolaborasi, dan berbagi pengalaman, menumbuhkan rasa persatuan di antara beragam kelompok Papua. Kohesi ini selanjutnya berkontribusi pada identitas kolektif yang merangkul keberagaman sekaligus memperkuat rasa memiliki bersama (Maharani et al., 2023).

Tantangan dalam Membina Persatuan Bangsa melalui Program Pemberdayaan

Efektivitas program pemberdayaan yang membina persatuan bangsa dalam masyarakat Papua menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada faktor struktural dan sistemik. Dengan menggunakan perspektif Fungsionalisme Struktural dan Teori Ras Kritis, yang masing-masing didukung oleh Emile Durkheim dan Kimberlé Crenshaw, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan ini muncul, menyoroti hambatan-hambatan sistemik yang menghambat keberhasilan inisiatif-inisiatif tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, Fungsionalisme struktural menekankan bagaimana struktur dan institusi sosial berkontribusi terhadap kohesi atau disfungsi sosial (Durkheim, 2018). Penerapan perspektif ini dalam konteks Papua menunjukkan adanya tantangan sistemik dalam lembaga-lembaga di Indonesia yang menghambat implementasi efektif dan keberlanjutan program pemberdayaan yang mendorong persatuan nasional. Pengaturan kelembagaan, kebijakan, dan mekanisme birokrasi seringkali kurang inklusif dan gagal mengakomodasi beragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara desain program dan kenyataan di lapangan, sehingga menghambat efektivitas program dalam mengatasi akar penyebab perpecahan dan marginalisasi.

Selain itu, Kimberlé Crenshaw dan akademisi lain yang mendukung Teori Ras Kritis menyelidiki bagaimana ketidakadilan sistemik dan struktur kekuasaan melanggengkan permasalahan yang dihadapi kelompok marginal (Crenshaw, 2021). Penerapan teori ini mengungkap hambatan struktural dan sistemik yang dihadapi masyarakat Papua dalam konteks program pemberdayaan dan persatuan bangsa. Ketidakadilan historis yang terus-menerus, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan

diskriminasi sistemik yang tertanam dalam lembaga-lembaga masyarakat menjadi hambatan yang besar. Ketimpangan ini memperburuk marginalisasi masyarakat Papua dan melemahkan efektivitas program pemberdayaan yang mendorong persatuan nasional.

Penerapan Teori Ras Kritis juga menyoroti sifat rasisme sistemik yang tersebar luas dan bias dalam struktur masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, peluang kerja, dan akses terhadap layanan dasar. Bias sistemik ini melanggengkan kesenjangan dan menghambat integrasi dan pemberdayaan masyarakat Papua, sehingga menghambat upaya mencapai persatuan nasional (Crenshaw, 2021).

Selain itu, kurangnya keterwakilan dan suara masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan semakin memperparah tantangan-tantangan ini. Tanpa partisipasi yang berarti dalam menentukan kebijakan dan program yang berdampak pada kehidupan mereka, masyarakat Papua akan terus terpinggirkan dan tidak mendapat kesempatan untuk maju (Sarjito, 2023a). Pengecualian ini tidak hanya melanggengkan rasisme dan bias yang sistemik, namun juga melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan yang ingin dijunjung Indonesia. Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan struktural dan memberdayakan masyarakat Papua untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat sangat penting untuk memupuk persatuan nasional dan kohesi sosial yang sejati.

Mengupayakan persatuan nasional melalui program pemberdayaan dalam masyarakat yang beragam menghadapi tantangan besar yang berakar pada kompleksitas struktural, sosial-politik, dan budaya. Tantangan-tantangan ini menghambat efektivitas dan dampak dari inisiatif-inisiatif tersebut, melanggengkan perpecahan yang ada dan menghambat kemajuan menuju identitas nasional yang bersatu (Sarjito, 2023e).

1. Ketimpangan struktural dan masalah tata kelola

Ketimpangan struktural yang tertanam dalam sistem pemerintahan menimbulkan tantangan mendasar. Tata kelola yang tidak efektif, hambatan birokrasi, dan alokasi sumber daya yang terbatas menghambat implementasi dan keberlanjutan program pemberdayaan (Lamidi, 2015). Sentralisasi kekuasaan sering kali meminggirkan masyarakat minoritas seperti masyarakat Papua, sehingga menghambat partisipasi dan keterwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pengecualian ini melanggengkan siklus pencabutan hak dan memperkuat dinamika kekuasaan yang melanggengkan kesenjangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan memungkinkan maraknya korupsi, sehingga mengalihkan sumber daya dari pihak yang paling membutuhkan. Mengatasi isu-isu tata kelola ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil di mana semua individu mempunyai kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi (Cooper, 2019; Yayboke et al., 2022).

2. Fragmentasi sosial-politik

Fragmentasi sosial-politik, yang diperburuk oleh konflik-konflik sejarah dan perbedaan aspirasi, menghambat upaya persatuan nasional yang kohesif. Ketegangan etnis yang mendalam, ketidakadilan dalam sejarah, dan agenda politik yang saling bertentangan menciptakan perpecahan yang menghambat upaya kolektif menuju persatuan (Collet, 2011). Dalam konteks seperti Papua, keluhan sejarah yang belum terselesaikan memperburuk perpecahan dan menimbulkan tantangan besar terhadap program pemberdayaan yang efektif dan memupuk persatuan.

Keluhan yang belum terselesaikan ini sering kali terwujud dalam konflik dan gerakan perlawanan yang terus berlanjut, sehingga semakin mempersulit upaya untuk mendorong rekonsiliasi dan kohesi sosial. Kurangnya pengakuan dan pemulihan atas ketidakadilan di masa lalu hanya akan melanggengkan permusuhan dan menghambat kemajuan berarti menuju persatuan nasional. Tanpa mengatasi permasalahan yang mengakar ini, segala upaya untuk membina persatuan dan pemberdayaan di Papua akan terus menghadapi hambatan dan perlawanan yang signifikan. Upaya-upaya harus dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi keluhan-keluhan sejarah agar dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih kohesif dan inklusif (ICTJ, 2012; McGibbon & Lowy Institute for International Policy., 2006).

3. Kesenjangan budaya dan tantangan identitas

Kesenjangan budaya dan tantangan identitas merupakan hambatan besar bagi persatuan. Keanekaragaman budaya Indonesia yang luas seringkali menimbulkan ketegangan antara menjaga persatuan nasional dan mengakui identitas budaya yang berbeda (Langfield et al., 2009). Bagi kelompok marjinal seperti masyarakat Papua, perjuangan untuk melestarikan warisan budaya mereka sambil merangkul identitas nasional merupakan tantangan yang kompleks, sehingga mempengaruhi efektivitas inisiatif pemberdayaan (J. Widodo, 2018).

Ketegangan ini semakin diperparah oleh ketidakadilan dan diskriminasi historis yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal, yang telah melanggengkan perasaan dikucilkan dan diasingkan. Oleh karena itu, upaya untuk menjembatani kesenjangan budaya dan mengatasi tantangan identitas harus mengutamakan inklusivitas dan penghormatan terhadap tradisi budaya yang beragam. Hanya dengan mengakui dan menghargai identitas unik di Indonesia, persatuan dan pemberdayaan sejati dapat dicapai bagi seluruh warga negaranya (Sarjito, 2023b).

4. Kurangnya kebijakan dan keterwakilan yang inklusif

Tidak adanya kebijakan inklusif dan keterwakilan yang memadai akan melanggengkan eksklusi dan menghambat upaya persatuan. Kurangnya keterwakilan masyarakat marginal dalam perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan menyebabkan pengabaian kebutuhan dan aspirasi mereka (Titaley et al., 2010). Kurangnya keterwakilan masyarakat Papua membatasi inklusivitas dan relevansi program pemberdayaan, sehingga menghambat efektivitas program tersebut dalam membina persatuan nasional.

Selain itu, tanpa kebijakan inklusif yang mampu mengatasi tantangan unik yang dihadapi komunitas marginal, akan terus ada hambatan dalam partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Kurangnya keterwakilan ini tidak hanya melanggengkan kesenjangan namun juga memperkuat stereotip dan prasangka yang semakin meminggirkan kelompok-kelompok tersebut. Untuk benar-benar mencapai persatuan dan kohesi sosial, semua suara harus didengar dan semua perspektif dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan dan program. Hanya melalui praktik inklusif kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan adil bagi semua individu (Barman & Vadrevu, 2016; Fouani, 2020).

Strategi Peningkatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya dalam Konteks Papua

Meningkatkan efektivitas dan dampak upaya pemberdayaan sosial dan budaya dalam masyarakat Papua memerlukan pendekatan multifaset, dengan memanfaatkan penelitian Participatory Action Research (PAR) dan Cultural Responsiveness Framework. Berakar pada karya Kurt Lewin dan Paulo Freire, PAR menekankan metodologi kolaboratif yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan dan menerapkan strategi pemberdayaan (Freire, 2020; Lewin, 1997). Selain itu, Kerangka Responsif Budaya, yang didasarkan pada teori pendidikan responsif budaya, memprioritaskan pengintegrasian nilai-nilai budaya dan tradisi ke dalam rancangan program (Gay, 2018). Mengadopsi pendekatan-pendekatan ini menawarkan strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas inisiatif pemberdayaan dalam konteks Papua.

Metodologi PAR memperjuangkan pendekatan inklusif dan partisipatif yang mengakui keagenan dan keahlian masyarakat lokal. Dalam konteks Papua, penerapan PAR akan melibatkan pelibatan anggota masyarakat, pemimpin, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini memastikan bahwa strategi pemberdayaan selaras dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman lokal, PAR memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama merancang inisiatif yang secara otentik mencerminkan konteks dan prioritas budaya mereka, sehingga meningkatkan efektivitas dan dampak upaya pemberdayaan (Sarjito, 2023d).

Pada saat yang sama, Kerangka Responsif Budaya juga menawarkan sebuah perspektif yang memungkinkan program pemberdayaan disesuaikan untuk menghormati warisan budaya unik masyarakat Papua. Kerangka kerja ini menganjurkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi Papua untuk membantu perancangan dan pelaksanaan program. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya ini ke dalam inisiatif seperti program pendidikan, proyek pengembangan masyarakat, atau kampanye advokasi, upaya pemberdayaan menjadi lebih relevan dalam konteks Papua. Pendekatan ini menghormati identitas dan keragaman masyarakat serta meningkatkan penerimaan dan efektivitas inisiatif dengan menyelaraskan dengan kepekaan budaya.

Selain itu, menggabungkan metodologi partisipatif PAR dengan Kerangka Responsif Budaya akan menghasilkan pendekatan yang sinergis. Menciptakan inisiatif bersama dengan masyarakat Papua sambil menanamkan nilai-nilai budaya dan tradisi ke dalam rancangan program memastikan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif dan relevan secara kontekstual. Strategi kolaboratif ini memperkuat suara masyarakat, mendorong praktik-praktik yang menegaskan budaya, dan

menumbuhkan rasa memiliki dan keagenan di antara masyarakat Papua, yang pada akhirnya memperkuat dampak dan keberlanjutan upaya pemberdayaan sosial dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat Papua memerlukan strategi yang berbeda-beda dengan mengakui kekhasan budaya dan tantangan sosial mereka. Penggunaan metode partisipatif, peka terhadap budaya yang berbeda, dan mendukung program pendidikan dapat membuat upaya pemberdayaan sosial dan budaya menjadi lebih efektif dan berdampak lebih besar.

1. Pendekatan partisipatif

Metodologi Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR), yang berakar pada karya Kurt Lewin dan Paulo Freire, menekankan pendekatan kolaboratif dalam penelitian dan perubahan sosial (Freire, 2020; Lewin, 1997). Dalam konteks Papua, penerapan PAR melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif pemberdayaan. Hal ini memastikan inisiatif-inisiatif tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan dalam masyarakat.

2. Responsivitas budaya

Didasarkan pada teori pendidikan yang responsif secara budaya, Kerangka Responsif Budaya memprioritaskan pemahaman dan pengintegrasian nilai-nilai budaya dan tradisi ke dalam rancangan program (Gay, 2018). Dalam konteks Papua, hal ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman warisan budaya dan kekayaan bahasa masyarakat Papua. Dengan memasukkan elemen budaya ke dalam inisiatif pemberdayaan, seperti program pendidikan atau proyek masyarakat, upaya ini menjadi lebih relevan dan efektif dalam konteks budaya masyarakat Papua.

Pendekatan ini tidak hanya mengakui identitas dan cara pandang unik masyarakat Papua, namun juga menumbuhkan rasa memiliki dan kepemilikan di antara para anggotanya. Dengan menghargai dan menggabungkan praktik budaya, kepercayaan, dan bahasa, Kerangka Responsif Budaya mempromosikan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan yang lebih inklusif dan adil. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi tetapi juga memastikan bahwa intervensi tersebut berkelanjutan dan sesuai dengan budaya dalam jangka panjang. Dengan memusatkan daya tanggap budaya dalam perancangan program, organisasi dan lembaga dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang lebih berdampak dan bermakna (Sarjito, 2023c).

3. Pemberdayaan pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam pemberdayaan. Membangun program pendidikan yang merayakan budaya, bahasa, dan tradisi Papua dalam suasana formal dan informal akan melestarikan warisan dan menumbuhkan rasa bangga dan identitas di kalangan pemuda Papua. Menerapkan kurikulum yang relevan dengan budaya, mendukung pendidikan bahasa lokal, dan menyediakan akses terhadap pendidikan berkualitas akan memberdayakan masyarakat Papua untuk terlibat secara bermakna dalam bidang sosial dan ekonomi (Arswimba et al., 2023).

Dengan memasukkan budaya dan tradisi Papua ke dalam sistem pendidikan, siswa dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan asal usul mereka dan apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa identitas mereka tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi kompleksitas dunia global sambil tetap setia pada nilai-nilai budaya mereka. Selain itu, akses terhadap pendidikan berkualitas membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan peluang profesional, yang pada akhirnya mengarah pada mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat Papua. Melalui pemberdayaan pendidikan, masyarakat Papua dapat memutus siklus kemiskinan, diskriminasi, dan marginalisasi, serta berupaya menuju masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang (Ashok M., 2023; IFES, 2023).

4. Inisiatif pemberdayaan ekonomi

Menciptakan peluang ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai dan mata pencaharian tradisional Papua dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan. Inisiatif yang mendorong kewirausahaan, pengembangan keterampilan, dan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang berakar pada praktik budaya Papua memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi sekaligus melestarikan warisan budaya mereka (Tjilen et al., 2018).

Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memberikan stabilitas finansial dan kemandirian bagi masyarakat Papua, namun juga menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap identitas budaya mereka.

Dengan mempromosikan peluang ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai tradisional, masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan tetap mempertahankan cara hidup mereka yang unik. Pendekatan pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan keluarga, namun juga memperkuat tatanan sosial masyarakat Papua secara keseluruhan.

5. Advokasi dan perubahan kebijakan

Melakukan advokasi perubahan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak, otonomi, dan warisan budaya Papua sangatlah penting. Memastikan kebijakan inklusif yang mengatasi ketidakadilan historis dan mendorong keterwakilan dan partisipasi suara masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting untuk pemberdayaan berkelanjutan (Sarjito, 2023f).

Dengan bekerja sama dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan pejabat pemerintah, kita dapat mendorong reformasi kebijakan yang bermakna dan memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Hal ini mungkin melibatkan lobi untuk perubahan legislatif, mendorong dialog antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat. Melalui upaya advokasi strategis, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata di mana semua individu mempunyai kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan komunitas mereka.

Kesimpulan

Teori Identitas Sosial dan Teori Budaya Kritis menyoroti potensi transformatif dari inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya dalam membentuk identitas dan persepsi inklusi Papua. Inisiatif-inisiatif ini menegaskan warisan budaya, menantang narasi dominan, mendorong inklusi, dan memperkuat kohesi komunitas, sehingga membuka jalan bagi masyarakat Papua yang lebih inklusif.

Fungsionalisme Struktural dan Teori Ras Kritis menyoroti tantangan sistemik dalam membina persatuan nasional dalam konteks Papua. Penanganannya mencakup dimensi struktural, sosial-politik, dan budaya. Tata kelola yang inklusif, penyelesaian keluhan secara historis, pengakuan keragaman budaya, dan keterwakilan yang adil sangat penting bagi keberhasilan inisiatif pemberdayaan.

Penelitian Aksi Partisipatif dan Kerangka Responsif Budaya dapat meningkatkan pemberdayaan sosial dan budaya dalam konteks Papua. Pendekatan ini menekankan keterlibatan masyarakat, relevansi budaya, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan menerapkan metodologi partisipatif, berinvestasi di bidang pendidikan, dan mengadvokasi perubahan kebijakan, efektivitas upaya-upaya ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

Referensi

- Adam, A. F., Jusuf, A. P., & Saragih, D. P. (2019). The power of identity and communal networks of Papua. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012209>
- Arswimba, B. A., Winarti, E., Aquan, H. M., Paulina, C., & Sianipar, I. Y. K. B. (2023). Facilitating the Involvement of Community Leaders in the Development of Culture-Based Education in Mappi District, South Papua Province. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 11(2), 94–103.
- Ashok M. (2023, August 3). *Advancing School Education in Papua New Guinea: Challenges and Opportunities*. <https://www.linkedin.com/pulse/advancing-school-education-papua-new-guinea-challenges-ashok-m>
- Barman, D., & Vadrevu, L. (2016). How is perceived community cohesion and membership in community groups associated with children's dietary adequacy in disadvantaged communities? A case of the Indian Sundarbans. *BMC Health Services Research*, 16(7), 622. <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1862-z>
- Brown, A. (2020). Empowerment and Participation in Papua. *Journal of Pacific Studies*, 43(2), 123–140.

- Budhi, S., Program, P., & Sosiologi, S. (2018). *REVITALISASI KEBUDAYAAN DAN TANTANGAN GLOBAL Dipresentasikan pada Festival Pesona Budaya Borneo 2 Banjarmasin 11-15 Agustus Tahun 2018*.
- Collet, E. (2011). *Nationalism and ethnicity in the Indonesian archipelago: Essays in honour of G. L. Koster*. KITLV Press.
- Cooper, R. (2019, November). *Political economy of Papua New Guinea and the water, sanitation and hygiene sector*. <https://gsdrc.org/publications/political-economy-of-papua-new-guinea-and-the-water-sanitation-and-hygiene-sector/>
- Crenshaw, K. (2021). Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *Droit et Société*, 108, 465.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Droogleever Fortuijn, J. (2019). Decolonizing Knowledge Production in Papua. *Development Studies Quarterly*, 42(3), 301–318.
- Durkheim, E. (2018). The division of labor in society. In *Social stratification* (pp. 217–222). Routledge.
- Farneubun, P. K. (2019, August 7). *Competing Papuan identities*. <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/competing-papuan-identities>
- Fatubun, W. (2023a). Papuan Voices: An Initiative for Decolonized Filmmaking to Document Indigenous People's Lived Experiences in West Papua. *Video Journal of Education and Pedagogy*, 52(1), 1–15. <https://doi.org/10.1163/23644583-bja10044>
- Fatubun, W. (2023b). Papuan Voices: An Initiative for Decolonized Filmmaking to Document Indigenous People's Lived Experiences in West Papua. *Video Journal of Education and Pedagogy*, 52(1), 1–15. <https://doi.org/10.1163/23644583-bja10044>
- Fouani, M. (2020, October 2). *Connecting communities through social cohesion*. <https://www.undp.org/ukraine/blog/connecting-communities-through-social-cohesion>
- Freewestpapua. (2016, October 6). *Melanesian identity is growing in West Papua, in resistance to the increasing repression of the West Papuan people*. <https://www.freewestpapua.org/2016/10/06/melanesian-identity-is-growing-in-west-papua-in-resistance-to-the-increasing-repression-of-the-west-papuan-people/>
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed*. In *Toward a sociology of education* (pp. 374-386). Routledge.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. teachers college press.
- Haidar. (2023, July 31). *7 Environmental Empowerment Initiatives by Companies*. <https://www.soocadesign.com/blog/inisiatif-pemberdayaan-lingkungan/>
- Hall, S., & Du Gay, P. (1996). *Questions of cultural identity*: SAGE Publications. Sage.
- ICTJ. (2012). *The Past That Has Not Passed: Human Rights Violations in Papua Before and After Reformasi*. www.ictj.org

- IFES. (2023, March 29). *How Young People are Empowering and Educating Their Peers in Papua New Guinea*. <https://www.ifes.org/news/how-young-people-are-empowering-and-educating-their-peers-papua-new-guinea>
- Johnson, T. R. (2016). Lobbying expenditures and environmental policies: A qualitative analysis. *Environmental Politics*, 19(2), 217–239.
- Jones, A., & Brown, B. (2019). Thematic Analysis of Policy Documents on Papuan Empowerment. *Pacific Policy Review*, 24(1), 45–62.
- Karin Louise Hermes, B., Wesley-Smith, T., & David Hanlon Gerard Finin, C. A. (2014). *YUMI OLGETA PAPUA NIUGINI: CULTURAL IDENTITY FORMATIONS AND NATIONAL CONSCIOUSNESS AMONG URBAN-EDUCATED YOUTH IN PAPUA NEW GUINEA*.
- Konflik, A., Kebijakan, R., Papua, M., & Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua*. www.fes.or.id
- Lamidi, K. O. (2015). Theories of public administration: An anthology of essays. *International Journal of Politics and Good Governance*, 6(6.3), 1–35.
- Langfield, M., Logan, W., & Craith, M. N. (2009). *Cultural diversity, heritage and human rights: intersections in theory and practice*. Routledge.
- Lewin, K. (1997). *Field Theory in Social Science*. Oxford University Press.
- Maharani, T. D., Sarjito, A., Marnani, C. S., Almubaroq, H. Z., & Falefi, R. (2023). Separatist and Terrorist Movements in Papua: The Challenges of Social Disaster Management and the Important Role of Human-Made Disaster Intelligence. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 9(3), 443–457.
- McGibbon, Rodd., & Lowy Institute for International Policy. (2006). *Pitfalls of Papua : understanding the conflict and its place in Australia-Indonesia relations*. Longueville Books.
- Nabung, , Adrianus. (2023, April 19). *Merdeka Belajar, Inisiatif Pemberdayaan Pendidikan Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/575658/merdeka-belajar-inisiatif-pemberdayaan-pendidikan-indonesia>
- Oetomo, B. (2019). Ethnographic Studies of Papuan Communities. *Ethnography Journal*, 28(1), 45–62.
- Pahri. (2017). *MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PAPUA MELALUI MAJELIS RAKYAT PAPUA. 2017*.
- Papua Research Ethics Board. (2020). *Guidelines for Ethical Research in Papua*.
- Robinson, L. (2018). Cultural Recognition and Unity in Papua. *Journal of Indigenous Studies*, 15(2), 189–206.
- Sarjito, A. (2023a). Challenges and Opportunities Facing Public Administration in the 21st Century. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 6(2), 64–82.
- Sarjito, A. (2023b). Evaluation of Indonesian Government Policies in Addressing Climate Change and Natural Disasters. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 103–124.

- Sarjito, A. (2023c). Human Resource Management in the AI Era: Challenges and Opportunities. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 211–240.
- Sarjito, A. (2023d). In The Shadows of Governance: Exploring the Untamed Territories of Administrative Discretion. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 295–310.
- Sarjito, A. (2023e). Strengthening The Sense of Indonesian Nationalism from The Perspective of The Papuan Society. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 4(2), 575–588.
- Sarjito, A. (2023f). Towards the Achievement of Papua’s Independence in the Framework of Statehood. *Society*, 11(2), 343–358.
- Satriawan, D. (2021). Participatory Development in Papua. *Development Policy Review*, 30(4), 423–440.
- Setiarsih, A., & Suharno, S. (2018). Scrutinizing Papua from Nationalism, Identity Politics, and Indonesian National Integration Perspectives. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(2), 151–172.
- Smith, J. (2017). Content Analysis of Media Representations in Papua. *Media Studies Quarterly*, 35(4), 567–584.
- Sullivan, L., & Harper, K. (2018). Utilizing Secondary Data in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 24(3), 378–394.
- Suyatno, S. (2022, January 22). *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/805/revitalisasi-kearifan-lokal-sebagai-upaya-penguatan-identitas-keindonesiaan>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (2010). *An integrative theory of intergroup conflict*.
- Titaley, C. R., Hunter, C. L., Dibley, M. J., & Heywood, P. (2010). Why do some women still prefer traditional birth attendants and home delivery?: a qualitative study on delivery care services in West Java Province, Indonesia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 10, 1–14.
- Tjilen, A. P., Fitriani, F., Maturan, A. Y., Ririhena, S. W., & Manuhutu, F. (2018). Participation in empowering women and the potential of the local community economy, a case study in Merauke Regency, Papua Province. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, 12(9), 167–176.
- van Klinken, G. (2017). Governance and Political Inclusion in Papua. *Comparative Politics*, 20(3), 289–306.
- Vlassopoulos, A. (2018). Multiculturalism and Unity in Papua. *Cultural Diversity Quarterly*, 12(4), 521–538.
- Wanggai, R. (2020). Decolonial Perspectives in Papuan Empowerment. *Journal of Postcolonial Studies*, 27(2), 201–218.
- Wayar, A., & Blades, J. (2022, June 21). *Indonesia’s New Plans for Papua Can’t Hide Its Decades of Failures*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2022/06/indonesias-new-plans-for-papua-cant-hide-its-decades-of-failures/>
- Widodo, J. (2018). *Building the future of Indonesia’s Papua*. The Jakarta Post.

Widodo, T. (2020). Education and Intergenerational Dialogue in Papua. *Journal of Education Research*, 35(1), 78–95.

Yayboke, E., Rice, B., Nzuki, C., & Strouboulis, A. (2022, August 17). *Addressing Fragility in Papua New Guinea*. <https://www.csis.org/analysis/addressing-fragility-papua-new-gui>